



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 481.16/ **205** /36/TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, serta dalam rangka memberikan pelayanan keterbukaan informasi kepada masyarakat guna mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Cilacap, perlu ditetapkan informasi yang dikecualikan pada Perangkat Daerah di Kabupaten Cilacap;
- b. bahwa pengklasifikasian informasi publik merupakan penetapan informasi sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan bahwa pengklasifikasian informasi ditetapkan berdasarkan pengujian konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Cilacap tentang Penetapan Informasi yang Dikecualikan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 197);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 183);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Informasi yang Dikecualikan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 481.16/359/36/Tahun 2022 tentang Penetapan Informasi yang Dikecualikan Bersifat Umum dan Khusus pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal **3 MAR 2023**

Pj. BUPATI CILACAP,


YUNITA DYAH SUMINAR



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
 NOMOR : 481.16/ **205** /36/TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA PERANGKAT DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA PERANGKAT DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

No	Konten Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Jika Informasi Dibuka	Jika Informasi Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1.	Perjanjian Kerjasama	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. PP Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah	Mengungkap Rahasia Pribadi	Melindungi Privasi bagi Para Pihak Dalam Perjanjian	terbatas sesuai jangka waktu perjanjian
2.	Hasil : Pemeriksaan Khusus yang Bersifat Khusus	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Peraturan Mendagri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	tidak terbatas
3.	Alat bukti kasus	a. UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat b. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Merugikan pihak dalam proses berperkara	Melindungi kerahasiaan alat bukti	tidak terbatas
4.	Dokumen penanganan perkara	a. UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat b. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Merugikan pihak yang berperkara	Merugikan kerahasiaan dokumen perkara	tidak terbatas
5.	Kasus hukum yang masih dalam proses	a. UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat b. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Dapat mengganggu penyelesaian proses hukum	a. Mengamankan dan melindungi alat bukti b. Tidak mengganggu/ menghambat proses hukum	Terbatas sampai penyelesaian proses perkara/ kecuali karena ketentuan Undang-Undang

No	Konten Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Jika Informasi Dibuka	Jika Informasi Ditutup	
1	2	3	4	5	6
		c. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana			
6.	Dokumen Kasus/Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang sedang proses di pengadilan dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde)	a. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana b. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU PTUN	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Dapat melindungi rahasia pribadi seseorang yang berperkara	Terbatas sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde)
7.	RKAP BUMD Berjalan	a. UU Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Pasal 22 b. UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 63 s/d Pasal 65 c. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan j d. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan informasi secara prematur; persaingan usaha bagi BUMD (bisnis plan)	Kinerja bisa terpantau dan terukur, pencapaian bisnis plan secara optimal	terbatas sampai dengan adanya laporan publikasi pada tahun berikutnya oleh Audit
8.	BUMD Bidang Keuangan (Bank Jateng dan BPR BKK) : Data nasabah penyimpan dan simpanannya; laporan pemeriksaan bank	a. UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 100 Tahun 1998 Pasal 33 dan Pasal 40 b. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e c. PP nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD dan UU PT.	Penyalahgunaan informasi yang tidak bertanggung jawab	Aspek dan norma kerahasiaan bank	tidak terbatas
9.	Proses evaluasi pemilihan dalam kegiatan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Batang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia dan PP Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perpres PPBJ	Akan terjadi intervensi, intimidasi dan kecurangan	Akan terjaga dari usaha peserta tender mencampuri proses evaluasi	Terbatas sampai dengan adanya pengumuman pemenang

No	Konten Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Jika Informasi Dibuka	Jika Informasi Ditutup	
1	2	3	4	5	6
10.	Dokumentasi penawaran teknis dan kualifikasi perusahaan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (PP Perpres Perka spt no 10)	Mengandung data perusahaan dan pribadi perorangan yang kemungkinan akan disalahgunakan	Tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan kegiatan, Menghindari persaingan usaha tidak sehat	Terbatas sampai dengan audit BPK RI
11.	Biodata elektronik PNS dan PPPK (ASN) (database)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h, UU Nomor 5 Tahun 2015 tentang ASN dan PP 17 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	tidak terbatas
12.	Dokumen / Berkas / Arsip PNS dan PPPK (ASN)	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h b. UU Nomor 5 Tahun 2015 tentang ASN c. PP 17 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	tidak terbatas
13.	Identitas PNS dan PPPK yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin.	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h b. PERKI Nomor 1 TAHUN 2021 c. PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS	Mengungkap data ASN yang bersifat rahasia kepegawaian.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
14.	Identitas PNS dan PPPK yang mengajukan izin perceraian.	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h b. PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	sampai dengan proses perceraian selesai

No	Konten Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Jika Informasi Dibuka	Jika Informasi Ditutup	
1	2	3	4	5	6
15.	Data rekam medik pasien	<p>a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h.</p> <p>b. PMK Nomor 269 / MENKES / PER / III / 2008 Tentang Rekam Medis</p> <p>c. PERKI Nomor 1 Tahun 2021</p> <p>d. UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan</p>	<p>a. Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia.</p> <p>b. Akan membahayakan seseorang apabila informasi disalahgunakan</p>	<p>a. Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.</p> <p>b. Melindungi Rahasia Pribadi seseorang</p>	Terbatas, dapat dibuka dalam hal : Kepentingan kesehatan atau permintaan pasien, permintaan aparaturnya penegak hukum / lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kepentingan penelitian (tanpa sebut identitas pasien)
16.	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	<p>a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i.</p> <p>b. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN</p> <p>c. PP Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS</p> <p>d. PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS</p>	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja.	Terbatas, sampai dengan pelantikan.
17.	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Sistem Informasi Harta Kekayaan (SiHARKA)	<p>a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (Pasal 17 huruf h)</p> <p>b. UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme dan UU ASN dan PP 94 disiplin PNS</p>	Mengungkap data pribadi wajib lapor yang bersifat rahasia	Menjaga dan melindungi kerahasiaan pribadi pegawai	Terbatas, sampai dipublikasikan oleh KPK

No	Konten Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Jika Informasi Dibuka	Jika Informasi Ditutup	
1	2	3	4	5	6
		c. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN d. PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS			
18.	Data Hasil Check up perorangan PNS / Pejabat	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h dan PERKI 1 TAHUN 2021 b. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU Rumah Sakit	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
19.	Data rencana penempatan ASN	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i b. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN c. PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	Mencegah KKN	Tidak terbatas
20.	Instrumen Tes Potensi/ Kompetensi PNS/ pejabat	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf l b. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN c. PP Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS	Mengurangi obyektivitas penilaian	Melindungi data pribadi	Tidak terbatas
21.	Soal tes CPNS	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf l b. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN c. PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS	Dapat disalahgunakan sehingga menimbulkan keresahan	Mencegah KKN	Tidak terbatas
22.	Riwayat dan kondisi anggota keluarga ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a sampai dengan j dan PERKI 1 TAHUN 2021	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

No	Konten Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Jika Informasi Dibuka	Jika Informasi Ditutup	
1	2	3	4	5	6
23.	Pengisian Jabatan JPT, Administrator, Pengawas, Kepala Sekolah, Kepala RSUD, Kepala Puskesmas dari SKPD, JPT, Direktur RSUD	<ul style="list-style-type: none"> a. UU ASN No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara b. PP 11 Tahun 2017 j.o PP 17 Tahun 2020 c. Perbup 15 Tahun 2018 d. PP Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS e. Pengaturan BLUD, UU tentang guru dan dosen 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terjadi kecemburuan yang memicu persaingan tidak sehat di antara PNS b. Campur tangan pihak lain 	Meredam situasi agar tetap kondusif dan tidak terjadi kecemburuan yang memicu persaingan tidak sehat di antara PNS	Terbatas sampai setelah Pelantikan
24.	Permohonan Rekomendasi Menteri Dalam Negeri untuk pengisian Pejabat Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> a. UU ASN No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara b. PP 11 Tahun 2017 j.o PP 17 Tahun 2020 c. Permendagri 76 Tahun 2015; d. UU tentang kependudukan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terjadi kecemburuan yang memicu persaingan tidak sehat di antara PNS b. Campur tangan pihak lain 	Meredam situasi agar tetap kondusif dan tidak terjadi kecemburuan yang memicu persaingan tidak sehat di antara PNS	Terbatas sampai setelah Pelantikan
25.	Bahan Rapat Baperjakat	<ul style="list-style-type: none"> a. UU ASN No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara b. PP 11 Tahun 2017 j.o PP 17 Tahun 2022 	Menjaga kondusivitas	Menjaga Independensi dan kondusivitas	Terbatas sampai setelah Pelantikan
26.	Permohonan rekomendasi Pejabat Inspektur Pembantu ke Gubernur	<ul style="list-style-type: none"> a. UU ASN No 5 Tahun 2014 b. PP 72 Tahun 2019 c. PP 11 Tahun 2017 j.o PP 17 Tahun 2020 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terjadi kecemburuan yang memicu persaingan tidak sehat di antara PNS b. Campur tangan pihak lain 	Menjaga Independensi dan Kondusifitas	Terbatas sampai setelah Pelantikan
27.	Hasil seleksi JPT Pratama	<ul style="list-style-type: none"> a. Permenpan 15 Tahun 2019 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terjadi kecemburuan yang memicu persaingan tidak sehat di antara PNS 	Menjaga Independensi dan Kondusifitas	Terbatas sampai setelah Pelantikan

No	Konten Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Jika Informasi Dibuka	Jika Informasi Ditutup	
1	2	3	4	5	6
		b. SE Menpan No 52 Tahun 2020	b. Campur tangan pihak lain		
28.	Mutasi Staf	a. UU ASN No 5 Tahun 2014 b. PP 9 Tahun 2009 c. Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2009 d. Perbup No 172 Tahun 2021	Mencegah terjadinya ketidakcocokan	a. Menjaga kondisifitas b. Pemerataan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	Terbatas sampai setelah diserahkannya SK Petikan Mutasi
29.	Hasil Pengukuran kompetensi PNS (JPT Pratama, Administrator, Pengawas, Pelaksana)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4 (hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang)	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat Rahasia	Tidak terbatas
30.	Hasil Rapat Penilaian Akhir Peserta Pelatihan Teknis, Fungsional Manajerial dan Pelatihan Dasar CPNS	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4 (hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektual, dan rekomendasi kemampuan seseorang)	Menimbulkan persepsi publik mengenai indikato penilaian yang akan mempengaruhi proses pelayanan penyelenggaraan pelatihan selanjutnya.	Proses Pelayanan penyelenggaraan pelatihan selanjutnya berjalan lancar.	Tidak terbatas
31.	Hukuman Disiplin ASN / PPPK & Berkas berkas terkait Hukdis	a. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN b. PP 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS c. PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS d. PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK (disamakan)	Mencemarkan Nama Baik	Menjaga Nama Baik	Tidak terbatas
32.	Perceraian ASN	a. UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Mencemarkan Nama Baik	Menjaga Nama Baik	Terbatas sampai surat ijin/keterangan perceraian terbit

No	Konten Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Jika Informasi Dibuka	Jika Informasi Ditutup	
1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> b. PP 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS c. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN d. PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS 			
33.	Soal-soal ujian yang akan diujikan ke peserta pelatihan Teknis, Fungsional, Manajerial dan Pelatihan Dasar CPNS	<ul style="list-style-type: none"> a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik Pasal 17 huruf J b. Diklat c. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN d. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS 	Mempengaruhi akuntabilitas dan obyektifitas hasil pelatihan	Terwujudnya Akuntabilitas dan obyektifitas hasil pelatihan	Tidak terbatas
34.	Penanganan kasus korban kekerasan berbasis gender dan anak	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan e. Prosedur standar operasional terutama dalam prinsip-prinsip pendampingan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Korban malu dan takut b. Korban merasa tidak terlindungi c. Korban merasa terancam d. Membuka rahasia korban e. Kurang menghormati hak-hak korban 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjaga privasi dan kerahasiaan korban b. Korban merasa aman dan terjamin kerahasiaannya c. Korban terlindungi d. Menghargai perbedaan individu e. Terpenuhi hak-haknya korban 	Tidak terbatas

No	Konten Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Jika Informasi Dibuka	Jika Informasi Ditutup	
1	2	3	4	5	6
35.	Kasus Kegagalan dan Komplikasi Kontrasepsi	<ul style="list-style-type: none"> a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h) b. UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan c. PerKI No 1 Tahun 2021 Pasal 1 No 12 dan UU Perlindungan Konsumen dan UU perlindungan Dokter dan RS 	Menjadikan rumor dan mengurangi Kesertaan Ber-KB	Data pribadi Akseptor terlindungi	Tidak terbatas
36.	Data korban kekerasan anak	<ul style="list-style-type: none"> a. UU Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 yang diperbaharui dengan UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 b. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h) c. PerKI No 1 Tahun 2021 Pasal 1 No 12 dan Tambah Perda 	Melanggar hak korban yang harus dirahasiakan	Hak korban atas kerahasiaan data pribadi tetap terlindungi	Tidak terbatas
37.	Data anak berhadapan dengan hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. UU Perlindungan Saksi dan Korban No. 13 Tahun 2006 yang diperbaharui dengan UU No. 31 Tahun 2014 b. UU Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012 c. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h) d. PerKI No 1 Tahun 2021 Pasal 1 No 12 	Melanggar UU, mencegah terjadinya tindak kejahatan terhadap anak	Melindungi data pribadi anak	Tidak terbatas
38.	Data korban kekerasan anak	UU Perlindungan Anaka No. 23 tahun 2002 yang diperbaharui dengan UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014	Melanggar hak korban yang harus dirahasiakan	Hak korban tetap terlindungi	Tidak terbatas

No	Konten Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Jika Informasi Dibuka	Jika Informasi Ditutup	
1	2	3	4	5	6
39.	Data anak berhadapan dengan hukum	a. UU Perlindungan Saksi dan Korban No. 13 Tahun 2006 yang diperbaharui dengan UU No. 31 Tahun 2014 b. UU Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012	Melanggar UU	Hak anak tetap terlindungi	Tidak terbatas
40.	Naskah Assesmen Nasional dan Ujian Sekolah/Lembaga	a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Permendikbudristek Nomor 17 Tahun 2001 tentang Assesmen Nasional, Petunjuk Operasional Assesmen Nasional (AN) dan Ujian Sekolah (US) dan Permendikbud	Membocorkan rahasia negara	Melindungi rahasia negara	Tidak Terbatas
41.	Hasil Assesmen Nasional dan Ujian Sekolah/Lembaga	a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Permendikbudristek Nomor 17 Tahun 2001 tentang Assesmen Nasional, Petunjuk Operasional Assesmen Nasional (AN) dan Ujian Sekolah (US) c. Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian dan Jenjang Pendidikan Menengah	Membocorkan rahasia negara	Melindungi rahasia negara	Terbatas sampai dengan pengumuman
42.	Data Penerima Manfaat meliputi: - BNBA DTKS	a. UU RI Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik b. UU RI Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di Pasal 84 tentang Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi	Data pribadi Penerima Manfaat tidak terlindungi	Data pribadi Penerima Manfaat terlindungi dan	Untuk data tertentu saja

No	Konten Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Jika Informasi Dibuka	Jika Informasi Ditutup	
1	2	3	4	5	6
		<p>c. PP RI Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di BAB VIII tentang Perlindungan Data Pribadi Penduduk</p> <p>d. Permensos RI Nomer 3 tahun 2021 tentang pengelolaan DTKS</p> <p>e. PerKI No 1 Tahun 2021 Pasal 1 No 12</p>			
43.	Data klient/penerima manfaat meliputi: Penerimaan disabilitas	<p>a. UU RI Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik</p> <p>b. UU RI Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di Pasal 84 tentang Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi</p> <p>c. PP RI Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di BAB VIII tentang Perlindungan Data Pribadi Penduduk</p>	Data pribadi Penerima Manfaat tidak terlindungi	Data pribadi Penerima Manfaat terlindungi dan terjaga kerahasiaannya	Terbatas

No	Konten Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Jika Informasi Dibuka	Jika Informasi Ditutup	
1	2	3	4	5	6
		<p>d. UU RI Nomor 14 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial</p> <p>e. PerKI No 1 Tahun 2021 Pasal 1 No 12 dan UU Kesejahteraan Sosial</p>			
44.	Hasil Diagnosa / Bedah Kasus Calon Klien (Penyandang HIV/AIDS dan eks WTS) - Mengungkap rahasia pribadi (Menggangu proses pelayanan terhadap klien) Mempermudah penanganan permasalahan yang dialami klien	<p>a. UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h</p> <p>b. PerKI No 1 Tahun 2021 Pasal 1 No 12</p> <p>c. UU nomor 36 tahun 2006 tentang Kesehatan</p> <p>d. UU tentang RS</p>	Mengungkap rahasia pribadi (Menggangu proses pelayanan terhadap	Mempermudah penanganan permasalahan yang dialami klien	Tidak terbatas
45.	Data Klien UPT (Penyandang HIV/AIDS dan eks WfS)	<p>a. UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h</p> <p>b. PerKI No 1 Tahun 2021 Pasal 1 No 12</p> <p>c. UU tentang RS</p>	Mengungkap rahasia pribadi (Menggangu kondisi psikologis dan traumatis klien sehingga mengganggu proses rehabilitasi/ penanganan klien)	Melindungi hak pribadi klien	Tidak terbatas
46.	Alamat Shelter (Tempat Penampungan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), Pelecehan Seksual)	<p>a. UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h angka 2</p> <p>b. PerKI No 1 Tahun 2021 Pasal 1 No 12 dan UU KDRT dan UU perlindungan Anak dan Perda Clp</p>	Mengungkap rahasia pribadi (riwayat, kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang)	Menjamin kenyamanan klien sehingga mempercepat proses rehabilitasi klien korban tindak kekerasan	Tidak terbatas

No	Konten Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Jika Informasi Dibuka	Jika Informasi Ditutup	
1	2	3	4	5	6
47.	Data dan dokumen Kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh negara	a. UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk Pasal 1, Pasal 79, Pasal 84, Pasal 85 ayat 1 s/d ayat 3 b. UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk Pasal 79 ayat 3, Pasal 84 Ayat 1 dan Perda Clp	Terjadi penyalahgunaan data pribadi	Menjamin dan melindungi kerahasiaan Data Pribadi seseorang	Tidak terbatas
48.	Nomor Induk Kependudukan (NIK)	UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk Pasal 1 Angka 22	Rawan penyalahgunaan data untuk tindak kriminal dan kejahatan lainnya seperti untuk pemalsuan data dalam transaksi keuangan, pinjaman online	Melindungi kerahasiaan dan kebenaran data penduduk	Tidak terbatas
49.	Register Akta Pencatatan Sipil	UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk Pasal 9 Ayat 1 Huruf c	Hanya untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan	Melindungi kerahasiaan dan kebenaran data penduduk	Tidak terbatas
50.	Laporan Data Balikan dalam pemanfaatan Data Kependudukan yang sudah diberikan hak akses oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri melalui perjanjian kerjasama dengan OPD/Lembaga Pengguna	a. UU Nomor 24 Tahun 2013 dalam Pasal 96A b. Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Pemanfaatan Data Kependudukan dalam Pasal 40 Tahun 2019, Pasal 2-5 dan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk	Data balikan melengkapi database kependudukan informasi dalam Big Data Kependudukan yang harus dijaga kerahasiaannya rawan penyalahgunaan data untuk tindak kriminal	Menjamin kerahasiaan, keutuhan serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dan tidak memberikan data kepada pihak lain	Tidak terbatas walaupun masa berlaku Perjanjian Kerja Sama sudah berakhir

No	Konten Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Jika Informasi Dibuka	Jika Informasi Ditutup	
1	2	3	4	5	6
51.	Data dukung persyaratan yang diupload, file Kartu Keluarga (KK) dan akta yang diproses oleh OPD/Lembaga melalui PKS dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	a. UU Nomor 24 Tahun 2013 dalam Pasal 96A b. Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 Pasal 2-5	Rawan penyalahgunaan data untuk tindak kriminal dan kejahatan lainnya seperti untuk pemalsuan data dalam transaksi keuangan, pinjaman online	Melindungi kerahasiaan dan kebenaran data penduduk	Tidak terbatas
52.	Identitas Pemilik dan Data Kendaraan Bermotor dalam Sistem Manajemen Database Pengujian Kendaraan Bermotor	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf j b. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah Diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 1 angka 16 c. PerKI No 1 Tahun 2021 Pasal 1 No 12 d. PermenHUB No 19 tahun 2021 Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data pribadi pemilik dan data kendaraan bermotor	Tidak terbatas
53.	Identitas Pemilik Kendaraan Wajib Uji	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h b. Permenhub Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Melindungi Kerahasiaan Identitas Pemilik Kendaraan Wajib Uji	Tidak terbatas
54.	Akses Database Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h b. Permenhub Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Menjaga Keamanan Data	Tidak terbatas
55.	Proses Penentuan Juara Lomba terkait dengan pemberdayaan masyarakat	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf i)	Berakibat terjadinya friksi antar nominator dan kolusi	Terhindarnya friksi antar nominator dan kolusi	Terbatas sampai penerbitan keputusan

No	Konten Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Jika Informasi Dibuka	Jika Informasi Ditutup	
1	2	3	4	5	6
56.	Proses penentuan penerima bantuan kepada Pemerintah Desa/kelurahan dan kepada kelompok masyarakat	<p>a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf i)</p> <p>b. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</p> <p>c. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	Menimbulkan kolusi dan nepotisme, terjadinya friksi antar Pemohon bantuan	Menghindari kolusi dan nepotisme dan terjadinya friksi antar Pemohon bantuan	Terbatas sampai penerbitan keputusan
57.	Dokumen penawaran kontrak dan kelengkapan penunjangnya	<p>a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan huruf j</p> <p>b. Perpres Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah</p> <p>c. PerKI Nomor 1 Tahun 2021 pasal 14 ayat 2 huruf i dan ayat 9 huruf b</p>	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas penilaian	Terbuka terbatas, sampai dengan selesainya proses pengadaan barang/jasa
58.	Hasil Penilaian Oleh Appraisal/ Penilaian Publik	UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Menimbulkan konflik bagi oknum yang tidak bertanggungjawab	Konduif antara pihak yang berhak, menghindari konflik dengan pihak-pihak yang tidak berkepentingan	Terbatas sampai dengan proses pengadaan tanah
59.	Dokumen Pengajuan Perizinan dan Non Perizinan yang ada di gedung arsip	<p>a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 12 huruf b</p> <p>b. PP no 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</p> <p>c. PP no 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</p>		Memberikan perlindungan dan rasa aman bagi pelaku usaha	Terbatas, Selama kegiatan usaha masih berjalan

No	Konten Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Jika Informasi Dibuka	Jika Informasi Ditutup	
1	2	3	4	5	6
60.	Data Intern Pelaku Usaha yang sudah di Upload di OSS RBA	<p>a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 12 huruf b</p> <p>b. PerKI No 1 Tahun 2021 Pasal 1 No 12 dan Perpres Investasi</p>	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dan persaingan usaha tidak sehat	Memberikan perlindungan dan rasa aman bagi pelaku usaha	Tidak terbatas
61.	Rencana lokasi jembatan/bangunan dan detail trace jalan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e angka 4 dan Perda RTRW	Menghambat kesuksesan kebijakan karena ada pengungkapan secara prematur	Mencegah spekulasi tanah	Sampai dengan selesai proses pembebasan tanah
62.	Rincian HPS (Harga Perkiraan Sendiri)	<p>a. UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</p> <p>b. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 Ayat 3 Huruf b</p> <p>c. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf i</p> <p>d. Perpres Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Pasal 26</p>	Menghambat kesuksesan kebijakan karena ada pengungkapan secara prematur	Mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dan melindungi hak intelektual	Tidak terbatas
63.	Dokumen penawaran kontrak dan kelengkapan penunjangnya	<p>a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 Ayat 3 Huruf b</p> <p>b. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf i</p>	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dan melindungi hak intelektual	Terbatas sampai dengan audit BPK RI

No	Konten Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Jika Informasi Dibuka	Jika Informasi Ditutup	
1	2	3	4	5	6
64.	Identitas pelapor dan isi laporan dugaan tindak korupsi/ penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai (Pengaduan Masyarakat)	<p>a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a</p> <p>b. Permenpan No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan UU Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN</p>	<p>a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak</p> <p>b. Masyarakat enggan melaporkan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)</p>	<p>a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan</p> <p>b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga mendorong terciptanya WBK dan WBBM</p>	Tidak terbatas, Atas persetujuan yang bersangkutan
65.	Dokumen pengaduan masyarakat	<p>a. Permenpan No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan UU Pemerintahan yg bersih dr KKN</p> <p>b. UU tentang KKN dan UU Nomor 14 tahun 2008</p>	Masyarakat/karyawan enggan melaporkan pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum	Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan pelanggaran kode etik profesi	Terbatas, untuk kepentingan pemeriksaan APIP dan APH
66.	Laporan Hasil Pemeriksaan/ Laporan Hasil Audit/ Laporan Hasil Pengawasan/ Laporan Hasil Evaluasi/ Laporan Hasil Reviu	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Dapat menimbulkan stimatisasi yang tidak pas karena perbedaan persepsi atas pernyataan/ penilaian antara birokrasi dan masyarakat	Rekomendasi/ pernyataan yang dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan dapat lebih efektif dan kondusif untuk adanya perbaikan sistem tata kelola	Terbatas, untuk kepentingan pemeriksaan APIP dan APH

No	Konten Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Jika Informasi Dibuka	Jika Informasi Ditutup	
1	2	3	4	5	6
67.	Dokumen SPJ Keuangan Kegiatan beserta lampirannya (Kwitansi, SPK, SPMU, SPJ, SPP, SPM)	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 19 ayat (1) jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 7 ayat (5)	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Terbatas, sampai setelah selesai Audit BPK RI
68.	Identitas subjek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan	UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 44 ayat 3 dan Kesehatan dan UU Kedokteran dan RS	Membuka rahasia pribadi	Melindungi kerahasiaan pribadi subjek penelitian	Tidak terbatas
69.	Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	Permenkes Nomor 1419/ MENKES/ PER/ X/ 2005/ Pasal 18 ayat 1, UU Kedokteran dan UU RS	Membuka rahasia pribadi	Melindungi kerahasiaan pribadi pasien	Tidak terbatas
70.	Hasil audit medik pada sarana kesehatan	Kepmenkes Nomor 496/ Menkes/ SK/ IV/ 2005	Disalahgunakan oleh pihak lain untuk kepentingan tertentu	Melindungi kerahasiaan pribadi pasien dan citra sarana kesehatan	Tidak terbatas
71.	Hasil audit terkait dengan medical error	Kepmenkes Nomor 496/ Menkes/ SK/ IV/ 2005	Disalahgunakan oleh pihak lain untuk kepentingan tertentu	Melindungi kerahasiaan pribadi pasien	Tidak terbatas
72.	Gambar/ Foto serta Video Rekaman Tindakan Medis, pasien dan petugas	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit c. PerKI No 1 Tahun 2021 Pasal 1 No 12	a. Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia b. Mengungkap proses pelayanan kesehatan	Melindungi data dan proses pelayanan pasien yang bersifat rahasia	Terbatas, sampai dengan mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan direksi, tanpa memperlihatkan identitas (wajah dan ciri khusus)

No	Konten Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Jika Informasi Dibuka	Jika Informasi Ditutup	
1	2	3	4	5	6
73.	RCA (Root Cause Analysis) yaitu dokumen yang digunakan dalam inisiatif problem solving untuk membantu tim menemukan akar penyebab (Root Cause) dari masalah yang sedang dihadapi. Berita acara/ risalah pembahasan oleh TIM RCA	<p>a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>b. UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan UU Kedokteran</p>	Petugas menjadi enggan dan takut melaporkan insiden KTD (Kejadian Tidak Diinginkan) maupun KNC (Kejadian Nyaris Cidera)	Petugas tidak ragu melaporkan insiden KTD dan KNC sehingga diharapkan dapat menurunkan angka insiden KTD dan KNC serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien	Terbatas sampai dengan mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan direksi
74.	Data hutang pasien kepada rumah sakit	<p>a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>b. PerKI No 1 Tahun 2021 Pasal 1 No 12</p>	Mengungkap data pasien	Melindungi data pasien yang bersifat rahasia	Terbatas, sampai dengan 30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017)
75.	Identitas petugas yang melakukan kesalahan dan yang melaporkan dalam laporan insiden keselamatan pasien	<p>a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>b. UU Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 47 ayat 2</p> <p>c. PerKI No 1 Tahun 2021 Pasal 1 No 12</p>	Mengungkap data pribadi pegawai melanggar HAM	Melindungi pegawai yang bersangkutan dari orang yang tidak bertanggung jawab	Terbatas sampai dengan 30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017)
76.	Kode akses elektronik Rekam Medik	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Membuka data yang bersifat rahasia	Mengamankan data agar tidak disalahgunakan	Terbatas sampai dengan 30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017)

No	Konten Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Jika Informasi Dibuka	Jika Informasi Ditutup	
1	2	3	4	5	6
77.	Sistem keamanan elektronik Rekam Medis	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Membuka data yang bersifat rahasia	Mengamankan data agar tidak disalahgunakan	Terbatas sampai dengan 30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017)
78.	Hasil audit medik pada sarana kesehatan	Kepmenkes Nomor 496 / Menkes / SK / IV / 2005	Disalahgunakan oleh pihak lain untuk kepentingan tertentu	Melindungi kerahasiaan pribadi pasien dan citra sarana kesehatan	Terbatas sampai dengan proses audit selesai
79.	Hasil audit terkait dengan medical error	Kepmenkes Nomor 496 / Menkes / SK / IV / 2005	Disalahgunakan oleh pihak lain untuk kepentingan tertentu	Melindungi kerahasiaan pribadi pasien	Terbatas sampai dengan proses audit selesai
80.	Lokasi server	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 30-37)	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data.	Melindungi/mengamankan perangkat serta data.	Tidak terbatas
81.	Internet protocol/IP Address Private	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE Pasal 30	Penerobosan/penyalahgunaan hak akses.	Menjaga/ melindungi hak akses.	Tidak terbatas
82.	Bandwidth Management	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE Pasal 30	Penyalahgunaan kapasitas bandwidth diluar ketentuan.	Mengatur kesetabilian penggunaan bandwidth	Tidak terbatas
83.	Kode akses elektronik	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 1 angka 16)	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer.	Tidak terbatas
84.	Sistem keamanan Elektronik	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf j b. UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 1 angka 16)	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer.	Tidak terbatas

No	Konten Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Jika Informasi Dibuka	Jika Informasi Ditutup	
1	2	3	4	5	6
85.	Sistem Majemen Database	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf j b. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 1 angka 16)	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer.	Tidak terbatas
86.	Spesifikasi Sarana Komunikasi Sandi	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf c angka 6	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi keamanan jalur komunikasi	Tidak terbatas
87.	Perangkat Khusus Persandian	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf c angka 6	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi keamanan jalur komunikasi	Tidak terbatas
88.	Kunci Sistem Sandi	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf c angka 6	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi berita / jalur informasi rahasia	Tidak terbatas
89.	Penempatan Jaringan, peralatan Sandi dan tempat kegiatan sandi	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf c angka 6	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Menjamin Keamanan jalur komunikasi	Tidak terbatas
90.	Jalur Komunikasi VVIP	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf c angka 6	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Menjamin Keamanan jalur komunikasi	Tidak terbatas
91.	Frekuensi Radio Komunikasi Persandian	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf c angka 6	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Menjamin Keamanan jalur komunikasi	Tidak terbatas
92.	Berita / Radiogram rahasia	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf c angka 6	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi berita / informasi rahasia	Tidak terbatas
93.	Rencana Penertiban/ Penindakan dan penegakan hukum pada objek tertentu	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat dan Perda K3	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Operasi penindakan dapat berjalan sesuai rencana	Terbatas sampai dengan selesainya perkara
94.	Informasi perkara pelanggaran Perda dan Perbup	a. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Penyidikan akan terpengaruh dengan provokasi	Perkara akan dapat diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku	Terbatas sampai dengan selesainya perkara

No	Konten Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Jika Informasi Dibuka	Jika Informasi Ditutup	
1	2	3	4	5	6
		b. Keputusan Menkum dan HAM tentang Pencabutan Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 tentang PPNS di lingkungan Pemda c. PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja d. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 1 huruf l			
95.	Data Hasil Evaluasi Kinerja PNS/ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
96.	Data hasil Tes Potensi/ Kompetensi PNS/ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
97.	Daftar penilaian prestasi kerja/ SKP/SAKIP/DP3/ PNS	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf i b. PP Nomor 10 tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Pasal 6 c. PerKI Nomor 1 Tahun 2021	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
98.	Arsip dinamis dan statis yang menurut sifatnya rahasia dan statis	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf l dan UU 34 Kearsipan dan UU Nomor 43 tahun tahun 2009 tentang Kearsipan	Bisa merugikan proses atau mengganggu proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan informasi/data rahasia secara prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas

No	Konten Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Jika Informasi Dibuka	Jika Informasi Ditutup	
1	2	3	4	5	6
99.	Peta lokasi penyimpanan arsip	<p>a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan huruf j</p> <p>b. UU Nomor 430 tahun tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3</p>	Mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya dirahasiakan	Kerahasiaan lokasi terjaga	Tidak Terbatas
100.	Rencana pelaksanaan tukar menukar/ pemindahtanganan	<p>a. UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf e angka 3</p> <p>b. PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan PP 12 Th 2019</p>	Mengganggu/ berpengaruh terhadap penataan siklus Pengelolaan Barang Daerah	Memudahkan pelaksanaan pemindahtanganan/ Siklus Pengelola Barang Milik Daerah	Sampai dengan penandatanganan berita acara serah terima
101.	Penilaian Tim Publik/ Pemerintah dalam rangka pemindahtanganan Barang Milik Daerah	<p>a. UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf e angka 3</p> <p>b. PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah</p>	Mengganggu/ berpengaruh terhadap penataan siklus Pengelolaan Barang Daerah	Memudahkan pelaksanaan pemindahtanganan/ Siklus Pengelola Barang Milik Daerah	Sampai dengan proses pemindahtanganan selesai
102.	Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon anggaran Sementara (PPAS)	<p>a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I (Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi Publik atau Pengadilan</p> <p>b. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja sehingga membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Sampai dengan ditetapkannya APBD

No	Konten Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Jika Informasi Dibuka	Jika Informasi Ditutup	
1	2	3	4	5	6
103.	Informasi tentang Wajib Pajak dan kewajiban perpajakannya yang dimohon selain oleh wajib pajak itu sendiri atau kuasanya. Contoh : Pemohonan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan permohonan cetak SPPT atau salinan data rekening koran RKUD	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h angka 3 b. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan Retribusi Daerah Daerah Pasal 172 ayat (1) c. UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf e angka 2 d. UU Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 40	Dapat Mengungkap Data Kerahasiaan Bank	Melindungi Data Transaksi Penerima dan Pengeluaran Daerah	Terbatas sampai dengan adanya permintaan dari Aparat Penegak Hukum
104.	Data Induk Tanah	UU Pokok Agraria No 5 tahun 1960	Jika ada terjadi kasus sengketa tanah	Untuk menghindari konflik/sengketa tanah	Tidak terbatas
105.	Data pemegang barang inventaris Kecamatan dan kendaraan dinas	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h) b. PerKI Nomor 1 Tahun 2021	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbatas kec..
106.	Daftar G30s/PKI/ Organisasi terlarang lainnya	a. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1975 b. PerKI Nomor 1 Tahun 2021 c. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h dan j) d. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3	Menjadi isu ada gerakan Organisasi Masyarakat terlarang bangkit lagi	Menjaga nama baik keluarga dan keturunan dari para anggota Organisasi Terlarang	Terbatas, untuk pemeriksaan APH/APIP
107.	Data penyewa tanah bengkok kelurahan	Keputusan Bupati Cilacap Nomor 028/403/40 Tahun 2017	Penyewa tanah bengkok tidak dimonopoli oleh salah satu penyewa	Tanah bengkok kelurahan tidak bisa di jual belikan dengan bebas	Terbatas untuk pemeriksaan APH/APIP
108.	Data Aset	a. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bisa disalahgunakan oleh Pihak yang tidak berkepentingan	Aset negara/daerah tidak dapat dijual belikan apalagi digunakan untuk kepentingan diluar kedinasan	Terbatas sampai dengan audit BPK

No	Konten Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Jika Informasi Dibuka	Jika Informasi Ditutup	
1	2	3	4	5	6
		b. Perda Cilacap Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah			
109.	Dokumen Informasi, materi dan hasil rapat tertutup yang bersifat rahasia	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	mengamankan proses penyusunan kebijakan	Tidak terbatas
110.	Berita Acara Pemeriksaan (BAP) PNS	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf i)	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
111.	Desain Stempel kedinasan	Peraturan Bupati Cilacap nomor 67 tahun 2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas	Penyalahgunaan wewenang	Menjaga keamanan	Tidak terbatas
112.	Data pinjaman karyawan kepada bank	UU no. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Mengungkap rahasia pribadi	melindungi dokumen pribadi yang bersifat rahasia	Terbatas
113.	Data rekening bank pegawai	a. UU no. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik b. PerKI Nomor 1 Tahun 2021	Melindungi hak pribadi		Terbatas
114.	Kegiatan intelejen terkait dengan ideologi, politik, sosial, budaya dan keamanan serta penanganan kasus yang mengganggu masyarakat.	a. UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c b. UU Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU pemerintahan daerah dan	Menimbulkan keresahan di masyarakat Mengganggu kelancaran penanganan kasus	Menjaga stabilitas daerah	Tidak terbatas
115.	Kajian teknis penetapan lokasi dan Basic Design pengadaan tanah untuk kepentingan umum/non kepentingan umum pada 2 Kab/Kota atau lebih	UU no. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf i	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengadaan tanah pengungkapan secara prematur menimbulkan spekulasi tanah	Kelancaran pelaksanaan pengadaan tanah	Terbatas sampai terbitnya SPZLP (Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan)

No	Konten Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Jika Informasi Dibuka	Jika Informasi Ditutup	
1	2	3	4	5	6
116.	Dokumen Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan BMD yang sedang dalam proses (surat, nota dinas, berita acara, surat keputusan)	a. UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf I dan PP b. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah c. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen Negara Daerah	Melindungi dari penyalahgunaan data dan menghindari kesalahpahaman publik	Terbatas sampai ditetapkan menjadi dokumen terbuka

